



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 792 /B.07/HK/2024**

### TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA  
PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Di Jakarta Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Surat Pengantar Plh. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung Di Jakarta Provinsi Lampung Nomor: 800.1.1.1/T-1724/VI.09/2024, hal Penyampaian Rekapitulasi Analisis Beban Kerja(ABK) dan Peta Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana, tanggal 21 Oktober 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Di Jakarta Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/623/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung Provinsi Lampung Di Jakarta Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-11-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *782* /B.07/HK/2024  
TANGGAL : *28-11* 2024

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)  
BADAN PENGHUBUNG DI JAKARTA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA /EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN /KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	KEPALA BADAN PENGHUBUNG DI JAKARTA PROVINSI LAMPUNG	0	1,423	1	-1	A		
2	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,142	1	0	A	11,977	A
3	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	17	22,982	23	-6	A		
4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	26,806	27	-23	A		
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	4	3,739	4	0	A		
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	7,220	3	0	A		
7	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	4,756	5	-5	A		
8	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,358	6	-6	A		
9	KEPALA SUB BIDANG KEMASYARAKATAN	1	1,290	1	0	A	2,941	A
10	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	5,382	5	-2	A		
11	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	3	4,099	4	-1	A		
12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	2,832	3	0	A		
13	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	-1	A		
14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,241	1	-1	A		
15	KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1	1,324	1	0	A	4,434	A
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	6,648	7	-2	A		
17	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,407	2	-1	A		
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	6	6,296	6	0	A		
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,382	2	-2	A		
20	KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	1	1,166	1	0	A	7,203	A
21	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	8,047	8	-2	A		
22	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	7	18,509	19	-12	A		
23	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	4,756	5	-5	A		
24	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,382	2	-2	A		
25	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
		<b>66</b>	<b>146,659</b>	<b>140</b>	<b>-74</b>		<b>26,555</b>	<b>A</b>

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

**2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

<p><b>KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>		<p><b>KEPALA SUB BIDANG KEMASYARAKATAN</b></p> <p>LUKMAN KURNIA RAMDHONI ST</p>		<p><b>KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</b></p> <p>MUCHAMAD RIKI JANUARI, S.E</p>		<p><b>KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI</b></p> <p>SITI NOVITA, S.E, M.Kes</p>	
<p><b>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA</b></p> <p>SULASTRI,S.Si</p>		<p><b>PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yormalina Johan, S.Pi</li> <li>Oki Tri Nurianto Setyanto Putro,S.E.,M.M</li> <li>Ade Hendriansyah,S.T.M.Tr.A.P</li> <li>Roshi Anggraeni, S.E</li> <li>Nizar Badrun S.H., M.M</li> <li>Zaezzilah S.E</li> <li>Mad Sugiri S.E</li> <li>Komsari S.Kom. M.M</li> <li>Dwiyanto S.T</li> <li>Nilawati S.E</li> <li>Supriyanto S.E</li> <li>Tri Yuningsih S.E</li> <li>Hari Triyanto S.T M.M</li> <li>Anton Rusdianto S.IP</li> <li>Wawan Kurniawan S.Kom. M.M</li> <li>Ansori S.E</li> <li>Ishariyati S.E</li> </ol>		<p><b>PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evi Julianty, S.Pi</li> <li>RS. Dwi Rama Elviana S.Sos MM</li> <li>Dewi Puspitasari S.E</li> <li>Toni Candra, S.H</li> <li>Mira Sondari S.Sos</li> </ol>		<p><b>PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mernadhine Syatira Alfarhusty S.IP,M.M</li> <li>Widya Susanti SE, MM</li> <li>Ferliana Damayanti SE, MM</li> <li>Aprilena Ansari S.IP. M.IP</li> <li>Asep Wahyudin S.IP, M.IP</li> <li>Mona Fatrisia SP</li> </ol>	
		<p><b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nani Nuracni SE</li> <li>Yasmawaty S.IP</li> <li>Rully Nugroho Parnanto</li> </ol>		<p><b>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nurul Hidayah S.AP</li> </ol>		<p><b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dini Prasetyani A.Md</li> <li>Ansori</li> <li>Rudi Nurdiansyah</li> <li>Mochamad Nawawi</li> <li>Indira Novriyanti</li> <li>Suparwoto</li> <li>Apriyanto</li> </ol>	
		<p><b>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Purwito</li> <li>Imam Purwoto</li> <li>Dinith</li> </ol>		<p><b>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ujang Sulacman</li> <li>Jumanto</li> <li>Beihaqi Rochmaddin</li> <li>Yayat Supriyatna</li> <li>Tri Setyo Haryadi</li> <li>Topik Hidayat</li> </ol>		<p><b>PENGELOLA UMUM OPERASIONAL</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>	
		<p><b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>		<p><b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>		<p><b>PENATA LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>	
		<p><b>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Arsonsi, SE</li> <li>Nama N</li> <li>Nyoto</li> <li>Budi Hariyanto</li> </ol>				<p><b>PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL</b></p> <p>Belum Ada Pegawai</p>	

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
1. Saluwih
2. Priambodo
3. Darmo
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

**3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA				
KLS	B	K	S	
12	0	1	1	-1

KELAS JABATAN				
KELAS 15	B	K	S	
0	0	0	0	0
KELAS 12	0	1	-1	
0	0	0	0	0
KELAS 11	0	0	0	0
0	4	4	0	0
KELAS 9	31	54	-23	
KELAS 7	4	8	-4	
KELAS 6	24	59	-35	
KELAS 5	3	14	-11	
KELAS 1	66	140	-74	
JUMLAH				

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA					KEPALA SUB BIDANG KEMASYARAKATAN					KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA					KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI									
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	9	1	1	0	PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	3	5	-2	PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	5	7	-2	PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	6	8	-2	PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	6	8	-2
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
OPERATOR LAYANAN	5	4	4	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	3	4	-1	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	2	-1	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	7	19	-12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	7	19	-12
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
OPERATOR LAYANAN	5	4	4	0	JABATAN	5	3	3	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	6	6	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	6	6	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	6	6	0
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
OPERATOR LAYANAN	3	3	3	0	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	0	1	-1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	0	5	-5	JABATAN	7	0	1	-1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	1	-1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	2	-2	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	2	-2
JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S	JABATAN	KLS	B	K	S
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	6	-6	JABATAN	7	0	1	-1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	1	-1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**  
  
**SAMSUDIN**